

## Kajian Empiris Peran Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Author; Husni Mubarak<sup>1</sup>

Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia

Alamat: Jl. Halmahera KM. 1, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Jawa Tengah 52121

Korespondensi penulis: [mubarokhus01@gmail.com](mailto:mubarokhus01@gmail.com)

**Abstract.** *This research investigates the impact of capital expenditure and locally generated revenue (Pendapatan Asli Daerah/PAD) on the financial performance of regional governments in Indonesia. The study employs a Systematic Literature Review (SLR) method to comprehensively collect, assess, and synthesize findings from prior empirical research related to this topic. By adhering to established SLR procedures, this approach ensures a structured, transparent, and reliable review process in selecting and analyzing relevant studies. In total, 50 articles published in reputable peer-reviewed journals were examined. The results indicate that locally generated revenue has a substantial influence on improving regional financial performance. Higher PAD reflects stronger fiscal independence and capacity, allowing local governments to effectively support development programs and deliver public services. In addition, capital expenditure demonstrates a positive and significant relationship with financial performance. Increased investment in capital assets contributes to infrastructure development, supports regional economic growth, and enhances overall competitiveness. These findings suggest that local governments need to strengthen efforts in optimizing PAD, particularly through revenue diversification strategies and improving the effectiveness of revenue collection systems. Moreover, prioritizing capital expenditure allocation is crucial to promote sustainable economic development and improve community welfare. The study also underscores the importance of maintaining financial management practices that are efficient, accountable, and transparent to achieve long-term regional development objectives.*

**Keywords:** *Localized Original; Income and Investment; Financial Performance.*

**Abstrak** Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan antara belanja modal dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Pendekatan yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR), yang memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, menelaah, serta mengintegrasikan berbagai temuan empiris secara terstruktur dan sistematis. Metode ini dipilih karena mampu menjamin proses kajian yang lebih objektif, komprehensif, dan transparan melalui penerapan prosedur baku dalam seleksi dan analisis literatur. Dalam penelitian ini, sebanyak 50 artikel jurnal bereputasi dijadikan sebagai sumber utama analisis. Hasil kajian menunjukkan bahwa PAD memiliki pengaruh yang kuat dalam mendorong peningkatan kinerja keuangan daerah. Tingginya PAD mencerminkan kemampuan fiskal yang lebih baik serta tingkat kemandirian daerah yang lebih tinggi, sehingga pemerintah daerah lebih leluasa dalam membiayai program pembangunan dan menyediakan layanan publik. Di samping itu, belanja modal juga berkontribusi secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan. Alokasi belanja modal yang meningkat terbukti mampu mendukung pembangunan infrastruktur, memperkuat fondasi ekonomi daerah, serta meningkatkan daya saing antarwilayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemerintah daerah perlu mengoptimalkan potensi PAD melalui pengembangan sumber-sumber pendapatan baru dan peningkatan efisiensi dalam sistem pemungutan. Selain itu, kebijakan peningkatan belanja modal harus terus didorong sebagai upaya strategis dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini juga menegaskan bahwa praktik pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel, efisien, dan transparan merupakan faktor kunci dalam mencapai tujuan pembangunan daerah secara berkesinambungan.

**Kata Kunci:** PAD, Pengeluaran Dana, Kinerja Keuangan

## **1. LATAR BELAKANG**

Pada pertengahan perkembangan ekonomi era reformasi tahun 1998, muncul tuntutan pembentukan otonomi daerah yang lebih komprehensif, sejati, dan akuntabel. Menanggapi tuntutan tersebut, disahkanlah Undang-Undang otoritas local UU No. 32/2004 dan hukum perdagangan yang tidak seimbang antara Bank Sentral dan Negara sehingga memperkuat pelaksanaan reformasi birokrasi. Hal inilah yang memunculkan apa yang disebut dengan proses transisi otonomi daerah, yaitu peralihan dari sistem dekonsentralisasi ke sistem desentralisasi (Yanto dan Astuti, 2020).

Dekonsentralisasi pemerintahan telah berakhir, dan desentralisasi atau juga disebut sebagai otonomi daerah telah menggantikan peran tersebut. Setiap daerah diberi otonomi yang cukup besar untuk menjalankan rumah tangga mereka sendiri dengan intervensi minimal dari pemerintah federal, seperti yang dijelaskan dalam UU No. 32/2004 yaitu memberikan otonom yang signifikan bagi otoritas. Dikatakan kepada distrik demi meningkatkan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan promosi partisipasi untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Desentralisasi dimaksudkan guna mengembangkan kemakmuran juga fasilitasi publik, meningkatkan kedaulatan rakyat, menegakkan keseimbangan serta kesetaraan, dan mempertahankan korelasi baik antar daerah (Bilqis dan Priyono, 2023).

Otonomi daerah yaitu ketika sebuah daerah memiliki kebebasan untuk menetapkan peraturan, berkumpul, berorganisasi, dan melaksanakan kebijakan, serta mengatur keuangannya sendiri (Sari dan Mustanda, 2019). Pemerintah pusat tidak dapat mengawasi kemajuan daerah secara mandiri, itulah sebabnya kebijakan otonomi daerah diterapkan. Pemerintah daerah memiliki autonomi, yang berarti mereka dapat secara mandiri membuat peraturan, membuat dan menerapkan kebijakan, dan memantau keuangan mereka sendiri. Ini biasanya berarti bahwa pemerintah pusat mendorong pemerintah daerah untuk memahami dan memenuhi kebutuhannya. Kawasan diberi kesempatan untuk memaksimalkan potensinya dengan menerapkan kebijakan otonomi daerah (Antari & Sedana, 2018).

Pendapatan Asli Daerah adalah suatu jenis dana wilayah yang diteliti. PAD dapat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai alat untuk mengurangi pinjaman perusahaan serta mendorong pertumbuhan wilayah. Keterkaitan mengenai modal publik. Seberapa besar atau kecil pemerintahan suatu daerah akan menentukan seberapa baik ia dapat mengatur dirinya sendiri dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Pelaksanaan berbagai tugas operasional masyarakat akan lebih mudah dengan pemerintah daerah yang berskala besar. Semakin banyak pemerintah daerah, semakin sedikit kapasitas daerah yang mendapatkan hasil pendapatan. Namun, kegiatan dana daerah masih dapat dioptimalkan (Mahadewi dan Indraswarawai, 2023).

Menurut Rafika Aulia dan Rahmawaty (2020) kemajuan yang dicapai oleh suatu daerah adalah hasil berdasarkan potensi daerah untuk mengendalikan financial dengan sukses. Rencana pendapatan dan pengeluaran daerah menunjukkan seberapa mampu pemerintah daerah mengelola dana keuangannya. Ini mencakup kapasitas mereka untuk mendanai pembangunan, meningkatkan pendapatan daerah, dan menyediakan layanan sosial kepada warganya. Selama dua tahun terakhir, realisasi pendapatan Pemerintah Provinsi Aceh telah menurun. Ini turun dari 18,71 triliun rupiah pada 2019. Ini terkait dengan bagaimana pandemi COVID-19 telah mempengaruhi penghematan biaya. Belanja modal melibatkan biaya langsung dan tidak langsung, yang merupakan masalahnya. Realisasi total 9,23 triliun terdiri dari 605.956 miliar belanja karyawan, 4,51 triliun membeli benda dan layanan, dan 3,16 triliun investasi. Di Indonesia, pandemi COVID-19 telah menyebabkan mode belanja menurunkan plafon (Pemerintah Provinsi Aceh, 2020). Selain itu, ada hubungannya dengan masalah dana perimbangan provinsi Aceh, yang totalnya sebesar Rp4,23 triliun pada 2019 tetapi hanya digunakan Rp4,28 triliun. Surplus disebabkan oleh perubahan dana alokasi umum yang berkaitan dengan pembiayaan pendapatan tahun anggaran 2019 pemerintah Aceh. Di Aceh, PAD sebesar Rp 2,5 triliun digunakan secara bersamaan untuk proyek pembangunan tahunan senilai 4,6 hingga 9,1 triliun. Anggaran yang diberikan tidak cukup untuk mempercepat kemajuan Aceh. Ini karena Aceh terus membutuhkan dana besar untuk program seperti beasiswa, kelanjutan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA), program utama Aceh serta perluasan jaringan jalan rencana prioritas Kabupaten (Safrina, 2021)

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **a. Definisi Pendapatan Asli Daerah**

Menurut Lathifa dan Haryanto (2019) ada sumber daya keuangan daerah terdiri dari dua kategori. Pertama, undang-undang menetapkan PAD, pembiayaan bagi hasil, dan pendapatan asli daerah lainnya sebagai bahan finansial otonom. Kedua, pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk melakukan inisiatif tertentu yang akan menghasilkan hasil setelah beberapa tahun. Pengembangan area fasilitas umum yang dapat menghasilkan infrastruktur adalah salah satu rencana. Karena belanja modal termasuk dalam kegiatan pembangunan infrastruktur, maka kalimat tersebut menunjukkan bahwa pengeluaran modal berlangsung yang memungkinkan daerah menghasilkan pendapatan.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) mengklasifikasikan aset tetap dan belanja modal baru. Pengeluaran di masa depan diperkirakan akan menguntungkan mengambil pengeluaran pemeliharaan selama berbagai periode akuntansi dan peranannya dalam memperpanjang masa

pakai, kapabilitas standar aset. Pengeluaran otonom, menurut regulasi Mendagri UU No. 13 Tahun 2006 mengenai penatausahaan keuangan daerah, didefinisikan sebagai biaya yang dikeluarkan untuk membeli, membangun, atau membeli aktiva tetap berwujud yang memiliki masa umur melebihi setahun juga dapat dilaksanakan saat pelaksanaan pemerintahan. Lahan, mesin, alat, konstruksi, struktur jalan, irrigation, jaringan, serta aset lainnya dapat termasuk pada kategori aktiva tersebut. Pengembangan, pengadaan, atau akuisisi hanya boleh memasukkan biaya pembangunan atau pembelian aset tetap fisik. Hasilnya adalah memiliki aset tetap yang dimiliki, yang merupakan kondisi yang diperlukan, dan belanja modal diperlukan. Tugas utama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik. Pihak berwenang anggaran Belanja Modal APBD adalah alat keuangan yang digunakan oleh daerah untuk meningkatkan aset tetapnya. Anggaran ini didasarkan pada kebutuhan infrastruktur dan fasilitas daerah, yang membantu menjalankan tugas pemerintahan dan fasilitas umum dengan lebih efisien. Pemerintah daerah sering membeli aset tetap setiap tahun untuk tujuan anggaran dan layanan publik, yang berdampak keuangan jangka panjang (Prastiwi dan Aji, 2020). Akan tetapi belanja modal yang dianggarkan setiap tahun menunjukkan investasi pemerintah daerah pada APBD. Jika peningkatan pendapatan APBD suatu provinsi di kota dan kabupatennya tidak diimbangi dengan peningkatan uang investasi, infrastruktur, dan fasilitas fisik yang tidak memadai akan mempengaruhi kota dan kabupaten yang sedang berkembang, menurunkan potensi ekonomi (Arini dan Kusuma, 2019).

Pendapatan Asli Daerah adalah pembiayaan untuk wilayah, komponen utama demi mencapai upaya kemandirian daerah itu dipakai sebagai pemasok dana perkembangan wilayah serta operasional pemerintah berdasarkan potensi daerah. Sumber pendapatan yang stabil bagi negara untuk memenuhi kewajiban pembangunan dan pemerintahan. Daerah yang menggunakan APBD dengan efisien mendapat manfaat dari PAD yang efisien. (Pangestu, 2023). Besarnya pendapatan yang diterima daerah yang bersangkutan sebagai Asli Daerah (PAD) menunjukkan seberapa baik daerah tersebut mampu mengelola keuangannya. Satu komponen dari pendekatan untuk mengevaluasi seberapa bergantung pada lingkungan terhadap pemerintah federal ialah melihat nilai PAD. Ketergantungan daerah terhadap pendanaan pemerintah pusat menurun seiring dengan meningkatnya nilai kontribusi PAD terhadap APBD (Bella, Sari dan Aswin 2022).

Penyediaan berdasarkan "Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah" Mendagri Nomor 13/2006, dipengaruhi oleh pajak, retribusi, dan administrasi kekayaan wilayah. Hasil ini termasuk porsi keuntungan dari hasil modal pada BUMD, BUMN, dan juga usaha swasta atau UMKM.

Selain itu, ada bentuk-bentuk PAD tambahan yang dihasilkan asal sumber lainnya dapat diterima yang dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan wilayah bukan termasuk dalam retribusi daerah, keuntungan dari pengelolaan aset daerah dibagi menurut objek penghasilan, dan pajak daerah (Lastri, Fatma dan Hardiansyah, 2021). PAD Kekayaan khas, pendapatan asli, Bea dan pungutan wilayah adalah penerimaan asli daerah lainnya yang dapat diterima. Ini merupakan sumber penghasilan daerah bahwa sangat penting untuk mencukupi pengeluaran, terutama pada belanja modal (Prawiroyudo dan Suhendro, 2023).

#### **b. Belanja Modal**

Capital expenditure adalah beban anggaran dibayar dengan membeli aset tetap dan aset lainnya mampu menghasilkan keuntungan sepanjang periode pelaporan. Pengeluaran anggaran dialokasikan berdasarkan keperluan otonomi akan fasilitas yang diperlukan bagi operasi pemerintahan dan proyek pekerjaan umum (Handayani dan Erinos, 2020). Belanja modal dapat membantu masyarakat dengan membangun infrastruktur, membeli mesin, dan memperoleh lebih banyak aset tetap. Salah satunya adalah biaya modal yang dimasukkan ke dalam anggaran belanja langsung pemerintah dan menyebabkan pemerintah memiliki lebih banyak aktiva tetap. Keputusan belanja modal dibuat oleh otonomi wilayah berdasarkan infrastruktur dan instrumen yang diperlukan guna mengoperasikan fasilitas umum dan menyelesaikan tugas resmi dengan cepat (Aulia Devi dan Tjahjono, 2023).

Menurut PP 71/2010, "Belanja modal yaitu pengeluaran otonomi daerah dengan keuntungannya lebih dari satu periode anggaran dan menjadi penambah aset daerah, kemudian dapat menyebabkan biaya teratur misalnya dana perawatan meningkat pada jenis-jenis belanja tata kelola" (Niswani dan Firdaus, 2022). Pengeluaran dana dipakai guna membeli aktiva tetap regional, Gedung dan peralatan. Metode untuk memperoleh belanja modal adalah dengan membeli aktiva tetap yang masih dalam kepemilikan pemerintah kota sebagai hasil dari belanja modal. Ini adalah komponen terutama dalam menyediakan layanan publik. Setiap periode, pemerintah kabupaten menyisihkan dana rencana belanja daerah guna membeli aktiva tetap yang sesuai tujuan, pengeluaran, dan layanan publik yang memiliki dampak keuangan jangka panjang untuk meningkatkan jumlah aset yang tersisa (Hardi, 2019).

Capital expenditure merupakan biaya aset, seperti membeli produk akan bertahan lama juga dapat terpakai dalam jangka waktu lama. Pada hal otoritas, misalnya, mendirikan sekolah baru, membeli software, membangun jalan raya, dan hospital, dan sebagainya. Belanja modal, yang dapat bertahan selama beberapa dekade, dapat menghasilkan pengelolaan ekonomi yang lebih hemat. Belanja modal terdiri oleh inisiatif kecil dan rencana satu tahun. Meskipun

demikian, proyek yang lebih kompleks membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan (Marlina, 2019).

Berdasarkan Undang-Undang No. 71/2010 tentang standard accounting, mengatakan belanja modal adalah total uang yang dibelanjakan untuk operasi tetap dan operasi menguntungkan lainnya selama beberapa waktu akuntansi. Kekayaan negara yang dapat digunakan, meliputi aset tambahan, bernilai setara dengan aset lainnya dan berumur lebih lama dari setahun. Yang dilakukan oleh pemerintahan daerah, belanja dikenal sebagai belanja daerah. Kegiatan anggaran melibatkan pemerintah federal dan daerah. Belanja pemerintah daerah digambarkan sebagai penurunan nilai aktiva bersih pada tahun anggaran yang berlaku. Melalui pembiayaan daerah, pemerintah federal menunjukkan komitmennya terhadap distrik wilayah melalui penyediaan wewenang untuk memantau serta mengawasi operasi otoritas wilayah serta kepentingan komunitas sekitar investasi yang dilakukan pemerintah daerah sangat baik karena adalah tanggung jawab regional selama satu tahun yang bukan kewajiban menerima kompensasi dari daerah. Tujuan belanja daerah adalah untuk memperbaiki daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Saat laba wilayah yang dapat diperoleh bertambah, kemampuan mereka demi membiayai pembelian daerah bisa meningkat (Aulia Devi dan Tjahjono, 2023).

### **c. Kinerja Keuangan**

Menurut Berti Indah Sari dan Halmawati (2023) kinerja didefinisikan sebagai tingkat keberhasilan pengelolaan keuangan dalam melaksanakan program kebijakan untuk memenuhi tujuan, tujuan, dan visi pemerintah otoritas. Efisiensi fiskal daerah ialah yemuan studi kuantitatif tentang kontribusi program atau kegiatan terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah. Evaluasi kinerja fiskal oleh pemerintah daerah beroperasi sebagai sumber informasi mengevaluasi juga memutuskan strategi untuk meningkatkan standar sektor publik.

Suatu organisasi dapat menilai kinerjanya dengan menganalisis rasio keuangan. Namun, pemerintahan kota belum sering menggunakan analisis rasio. Bahwa saat ini tidak ada kejelasan arah karena hanya sedikit pihak yang mengevaluasi kesuksesan keuangan daerah dengan menggunakan financial analysis ratio pada sektor publik (pemerintah), khususnya APBD. Untuk menjaga keterbukaan, integritas, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, analisis rasio masih diperlukan (Darmastuti, 2022).

Ada keyakinan bahwa peraturan keuangan daerah yang efektif akan menghasilkan pengelolaan pendapatan daerah yang lebih baik juga. Kinerja fiskal daerah yang kuat menunjukkan bahwa daerah itu kuat secara keseluruhan. Kinerja finansial suatu daerah adalah tolak ukur daya pemerintah dalam mengelola otonomi daerah. Ada banyak cara untuk

mengevaluasi kinerja keuangan. Untuk menghitung kinerja keuangan dapat menggunakan sumber informasi finansial seperti budget pemasukan serta pengeluaran wilayah. Meningkatkan prestasi otoritas daerah, meningkatkan kelembagaan dan komunikasi, meningkatkan akuntabilitas publik dapat membantu pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya adalah tiga tujuan dari pengukuran kondisi keuangan daerah pemerintah (Yulinchton, 2022).

Pemerintah kota telah melakukan tindakan yang diakui secara finansial untuk mengevaluasi seberapa efektif mereka menghasilkan pendapatan dan menggunakan sumber daya mereka untuk mencari peluang untuk berkembang dan berkembang. Laporan keuangan pemerintah dapat digunakan untuk menunjukkan keadaan dan kinerja pemerintah. Laporan keuangan yang kuat harus menunjukkan bahwa rangkuman pelaporan memperoleh informasi yang akurat dan bermakna mengenai kinerja keuangan pemerintah dalam penyajian keuangannya (Febrianti dan Putra, 2023).

### **3. METODE PENELITIAN**

Penulis memakai pendekatan SLR (Systematic Literature Review), yang berarti mengkritik serta menilai riset sebelumnya secara sistematis dengan menerapkan standar yang berlaku. Metode ini digunakan untuk memeriksa hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal yang berfokus pada bidang studi tertentu. Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan tanpa perlu melakukan pengumpulan secara langsung di tempat kejadian. Dengan menggunakan Google untuk melakukan pencarian data dengan Kata kunci menjadi fokus utama seperti "pemasukan daerah, investasi infrastruktur, evaluasi keuangan.", diperoleh 1.000 artikel yang relevan. Selain itu, menulis 573 artikel tentang berbagai tema terkait. Kami membatasi tahun penerbitan jurnal menjadi 2018–2024 karena jumlah ini tidak mencukupi, dan kami menemukan 139 artikel. Pada akhirnya, kami mengumpulkan 53 publikasi dari berbagai jurnal global, termasuk Google Scholar, Publish of Perish, dan Semantic Scholar, setelah mengekstrak beberapa artikel sampel yang sesuai dengan fokus penelitian.

### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Jurnal-jurnal terdahulu yang dipilih dan dibaca dengan cermat oleh penulis dan dikategorikan sesuai dengan relevansi istilah utamanya, "revenue local", "pengeluaran untuk asset tetap", serta "efisiensi keuangan". Tabel matriks dibuat sebagai hasil dari proses penelitian ini oleh penulis untuk memudahkan dalam mengkategorikan sesuai kata kunci, seperti tabel dibawah ini:

**Table 1**  
**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan**

| No | Judul Penelitian   | Nama Peneliti                                      | Tahun | Metode      | Hasil Penelitian   |
|----|--|--|-------|-------------|--|
| 1  | Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Budget Ratcheting sebagai Variabel Moderasi | Ni Luh Putu Dita Silviani, I Made Pradana Adiputra | 2023  | Kuantitatif | Kenaikan PAD mampu mengoptimalkan penanaman modal daerah. Pengaruh PAD dan dana perimbangan terhadap belanja modal semakin kuat dengan adanya budget ratcheting. |
| 2  | Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi dan Belanja Daerah di Kota Makassar terhadap Pendapatan Asli Daerah                                | Imran Tajuddin                                     | 2024  | Kuantitatif | Pertumbuhan ekonomi dan belanja daerah berdampak positif terhadap PAD dan menjadi dasar peningkatan penerimaan daerah di Kota Makassar periode 2012–2021.        |
| 3  | Determinan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah  | Amin Insani, Sri Rahayu, Misni Erwati              | 2023  | Kuantitatif | Peningkatan PAD dapat meningkatkan kinerja keuangan, namun ketergantungan pada dana pusat menyebabkan kinerja keuangan menjadi rendah.                           |
| 4  | Efek PAD, Dana Perimbangan, Lain-lain Pendapatan yang Sah dan SILPA terhadap Alokasi Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi          | Fauzi Fauzi  | 2021  | Kuantitatif | PAD dan dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau (2010–2017).                            |
| 5  | Pengaruh PAD, DAU, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat                | Nareswari, Listya Nindita, Sri Rahayu              | 2018  | Kuantitatif | PAD, DAU, dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Terdapat korelasi negatif antara tingkat kemandirian dan ketergantungan daerah.    |
| 6  | Pengaruh PAD dan Belanja Modal   | Yuliasti Leki, Amran T.                            | 2018  | Kuantitatif | PAD berpengaruh positif terhadap kinerja   |

|   |   |   |      |             |  |
|---|---|---|------|-------------|--|
|   | terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat  | Naukoko, Jacline I. Sumual                    |      |             | keuangan, namun tidak signifikan secara statistik.   |
| 7 | Pengaruh Belanja Modal terhadap Peningkatan PAD Provinsi Papua  | Agus Sunaryo                                  | 2023 | Kuantitatif | Belanja modal berkontribusi positif terhadap PAD, namun tidak signifikan secara statistik di Provinsi Papua.   |
| 8 | Pengaruh Good Corporate Governance, PAD, DAU, Belanja Modal dan Kesejahteraan Masyarakat terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Gresik | Allen Pranata Putra, Adam Rio Fandi           | 2021 | Kuantitatif | GCG, PAD, dan DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan belanja modal dan kesejahteraan masyarakat tidak berpengaruh signifikan. |
| 9 | Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan                                  | Nurhasanah, Annisa Sarina Devi, Nelly Masnila | 2022 | Kuantitatif | Kinerja keuangan daerah (pertumbuhan, efisiensi, efektivitas, dan ketergantungan) berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.                       |

Menurut Mubarak Husni (2022) efektivitas Realisasi PAD menurun, sementara realisasi pengeluaran daerah meningkat. Kontribusinya sekadar mengalami sedikit perubahan antara kurun waktu 2024 dan 2025. Mengingat kedudukan efikasi PAD terhadap belanja daerah di Kabupaten Bengkalis berbeda-beda. Kinerja PAD tidak berkorelasi langsung dengan kinerja belanja daerah seperti yang tergambar pada tahun 2024–2025.

Secara alami, ada banyak variabel yang mempengaruhi kemandirian daerah. Variabel keuangan, kesejahteraan, dan lingkungan adalah beberapa yang paling signifikan, dan hubungan antara variabel ini berdampak pada kemandirian daerah, dengan manfaat positif terhadap hasil keuangan daerah.

**Tabel 2**  
**Topik Penelitian**

| <b>Topik Penelitian</b>  | <b>Jumlah</b> | <b>Presentase</b> |
|--|---------------|-------------------|
| Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah                             | 19            | 38%               |
| Pendapatan Asli Daerah Terhadap Daerah Kinerja Keuangan, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi | 14            | 28%               |
| Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Modal   | 13            | 26%               |
| Pendapatan Daerah Terhadap Kemandirian   | 4             | 8%                |
| <b>Total</b>   | <b>50</b>     | <b>100%</b>       |

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini mengusut implikasi pembelian modal dan Pendapatan Asli Daerah berdasarkan level keterlibatan personel pemerintah Indonesia. Studi ini menemukan bahwa manfaat daerah yang belum berkembang berpengaruh positif dan signifikan terhadap operasi otoritas wilayah. Itu menyatakan yakni jika daerah mendapatkan lebih banyak devisa, mereka dapat menjadi lebih kuat. untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan pemekaran wilayah. Terlebih lagi, capital expenditure menguntungkan hasil mata uang pemerintah daerah. Akibatnya, struktur pembangunan daerah dapat diperkuat dengan peningkatan modal share. Ini juga berpotensi mengembangkan tingkat pergerakan ekonomi dilokasi yang dimaksud..

## DAFTAR REFERENSI

- Antari, N. P. G. S., & Sedana, I. B. P. (2018). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 7(2), 1080. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2018.v7.i02.p19>
- Aulia Devi, A., & Tjahjono, A. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah (Pad), dana alokasi umum (Dau), dana alokasi khusus (Dak), dan dana bagi hasil (Dbh) terhadap belanja modal pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2017-2020. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(3), 1104–1126. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v3i3.778>
- Aulia, R. R. (2020). Pengaruh kemakmuran pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di provinsi Aceh. *Volume(5)(4)*, 584–598.
- Bella, S., Sari, F., & Aswin, U. R. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. *Volume(3)(5)*.

- Bilqis, H. K., & Priyono, N. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah periode 2015-2020. *Jurnal Economina*, 2(2), 612–621. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.340>
- Darmastuti, W. Y., Susilowati, E., & Tannar, O. (2022). Pengaruh kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap alokasi belanja modal di kabupaten/kota provinsi Jawa Timur. *Jurnal Proaksi*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.32534/jpk.v9i1.1913>
- Febrianty, N., & Putra, G. H. (2023). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah pada 19 kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat tahun 2018-2021. *JKA: Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(2).
- Handayani, T. U. E. (2020). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. *Volume(2)(1)*, 2348–2361.
- Husni, M. (2022). Analisis pendapatan asli daerah (Pad) terhadap belanja daerah studi kasus pada kabupaten Bengkalis tahun 2017-2019. April.
- Lastri, S., & Fatma, S. H. (2021). Peran mediasi belanja modal dalam hubungan pengaruh dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah. *Volume(11)(3)*.
- Lathifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017. *Diponegoro Journal of Accounting*, 8(2), 1–10. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Mahadewi, M. A. M., & Indraswarawati, S. A. P. A. (2023). Pengaruh pengukuran pemerintah daerah, belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kota/kabupaten di provinsi Bali. April, 107–116.
- MARLINA, L. (2019). Pengaruh kinerja keuangan daerah dan budget ratcheting terhadap alokasi belanja modal (bukti empiris pada kabupaten/kota di provinsi Aceh). *Akbis: Media Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 2(2), 34–44. <https://doi.org/10.35308/akbis.v2i2.931>
- Neilis, S., & Rohman, A. (2019). Pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan pendapatan asli daerah sebagai variabel intervening. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1(2), 1–11.
- Niswani, N., & Firdaus, R. (2022). Pengaruh belanja modal, dana perimbangan, dan pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan daerah kabupaten/kota provinsi Aceh tahun 2016-2020. *Volume(1)(1)*, 64–78.
- Pangestu, R. (2023). Pengaruh pajak daerah, dana perimbangan, pendapatan asli daerah, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan kabupaten/kota. *Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS)*, 4(3), 1080–1088. <https://doi.org/10.47065/ekuitas.v4i3.2745>

- Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Dana keistimewaan dan belanja modal terhadap (studi kasus pada pemerintahan daerah kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2013-2018). *Volume(28)(1)*, 89–105.
- Prawiroyudo, M. P., & Suhendro, S. (2023). Fund and special allocation fund on capital expenditure budget allocation (empirical study on regency and city governments throughout Indonesia in 2018-2021) pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus. *Volume*, 9934–9946.
- Sari, B. I. (2023). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat. *Volume(3)(1)*, 56–60. <https://doi.org/10.4324/9781003322603-5>
- Yanto, J. K. F., & Astuti, S. (2020). Pengaruh kinerja keuangan terhadap alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. *Volume(2)(3)*.
- Yulinchton, M. R., Ariani, M. B. N., & Triwahyuningtyas, N. (2022). Analisis kinerja keuangan pemerintah daerah: Studi kasus di kabupaten Tegal periode 2016-2019. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, Dan Entrepreneurship*, 11(2), 303. <https://doi.org/10.30588/jmp.v11i2.893>.